

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Konseptual

##### 1. Tinjauan Umum Tentang Peran

###### a. Pengertian Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat

tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.<sup>1</sup>

apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut

kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban Kepolisian dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh.

Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya Kepolisian sebagai suatu organisasi

formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya

peranan yang nyata.<sup>2</sup> Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan

<sup>1</sup> <https://kbbi.web.id/peran> diakses pada 10 oktober 2018

<sup>2</sup> <http://digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%20II.pdf> diakses pada 10 oktober 2018

kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan / diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peran adalah suatu rangkaian yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan.

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya.

Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran (*role*). Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas ada baiknya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran.



Penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan dinas pendidikan, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan merupakan tugas dan wewenang dinas pendidikan.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Pendidikan

### a. Pengertian Pendidikan

Kegiatan pendidikan adalah banyak cakupannya dan sangat berkaitan dengan perkembangan manusia muda, mulai perkembangan jasmaniah dan rohaniah, antara lain: perkembangan fisik, pikiran, perasaan, kemauan, kesehatan, keterlampiran, sosial, hati nurani, kasih sayang.<sup>3</sup> Pendidikan adalah kegiatan membudayakan manusia muda atau membuat orang muda ini hidup berbudaya sesuai standar yang diterima oleh masyarakat. Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterlampiran yang diperlukan dirinya dan masyarakat.<sup>4</sup>

Pengertian pendidikan memang sangat beragam dan tidak salah karna setiap penulis memberikan pengertian menurut sudut pandang mereka masing-

<sup>3</sup> Amors Neolaka dan Grace Aminalia A. Neolaka, landasan pendidikan : dasar pengenalan diri sendiri menuju perubahan hidup, cet. 1, Depok: charisma putra utama, 2017 hal., 2.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal 2.

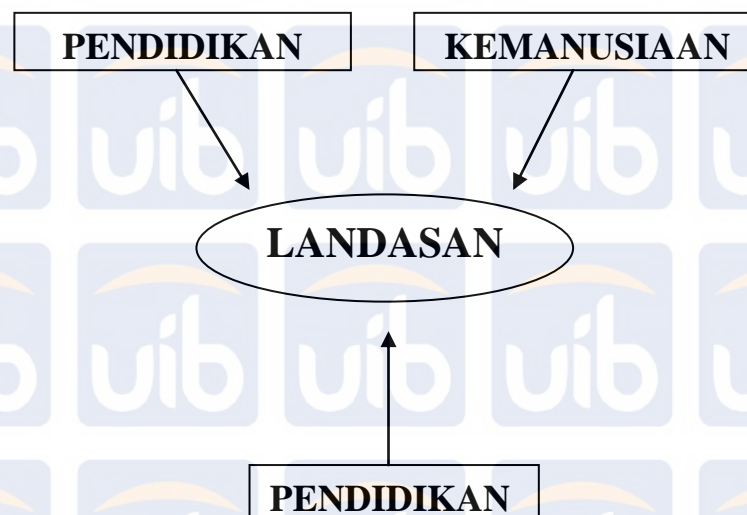
masing. Pengertian pendidikan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional juga sudah cukup bagus, namun yang akan menjadi masalah adalah bagaimana operasionalisasinya atau penerapan didalam praktik nyata di lapangan. Oleh karna itu, pengertian pendidikan. Pertama, hanya dalam satu kata, yaitu pendidikan adalah “latihan”. Para pembaca dapat merenung sendiri bahwa segala sesuatu dapat kita ketahui, pahami, dan memperoleh keterlampiran, serta disikapi dan dilaksanakan, hanya dengan latihan terus menerus dan berkelanjutan. Untuk memperoleh kompensasi, atau seseorang yang dikatakan kompeten, harus memiliki pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), dan sikap kerja (*attitude*). Kompensasi pengetahuan akan bertambah apabila latihan membaca buku-buku yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan kita atau spesialisasi sesuai program studi yang kita sudah miliki.<sup>5</sup> Peningkatan kompetensi keterampilan dilakukan melalui banyak latihan. Ada pun untuk sikap dan perilaku yang kurang menyenangkan, misalnya ada peserta didik yang sering terlambat datang ke sekolah, maka dapat berubah atau diperbaiki dengan cara latihan untuk datang lebih cepat atau lebih awal. Pengertian pendidikan yang kedua, yaitu: pendidikan adalah proses atau kegiatan membelajarkan peserta didik untuk mengenal dirinya sendiri bahwa dia memiliki potensi dalam dirinya.

Pengertian pendidikan seperti di atas, maka pengertian “landasan pendidikan” adalah asumsi yang menjadi fondasi dan dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka latihan atau praktik pendidikan dan/atau studi pendidikan, untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal 3.

aktif mengembangkan potensi dirinya sendiri. Pengertian landasan dikaitkan dengan pendidikan menjadi penting karena landasan dalam pendidikan ialah sebagai acuan konsep, prinsip, teori, bagi para pendidik atau guru, dalam rangka melaksanakan praktik pendidikan dan/atau studi pendidikan. Landasan dalam pendidikan ini tertuju kepada pengembangan wawasan kependidikan, yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam melaksanakan tugasnya. Berbagai asumsi yang bersifat pendidikan yang telah dipilih dan di adopsi oleh seorang tenaga kependidikan berfungsi memberikan dasar rujukan konseptual dalam rangka praktik pendidikan dan/atau studi pendidikan.



Gambar 2.1 Landasan Pendidikan

Sumber: Neolaka, 2015: 3.



Tampak pada Gambar di atas bahwa landasan menjadi penting. Untuk mendapatkan pendidikan yang kukuh dan berkualitas harus dimulai dari landasan pendidikan yang kuat. Pendidikan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya jika landasan tidak kuat atau tidak utuh. Landasan dalam pendidikan ibarat fondasi dasar untuk membangun pendidikan sesuai arah yang di cita-citakan bangsa. Tentu kita tidak ingin mencetak generasi penerus hanya dengan berpedoman pada nilai yang dihasilkan saja. Nilai hanya menunjukkan kuantitatif dari hasil pencapaian belajar, tetapi tidak bisa dijadikan sebagai alat ukur keberhasilan karena kualitas pendidikanlah yang menjadi indikator utama.

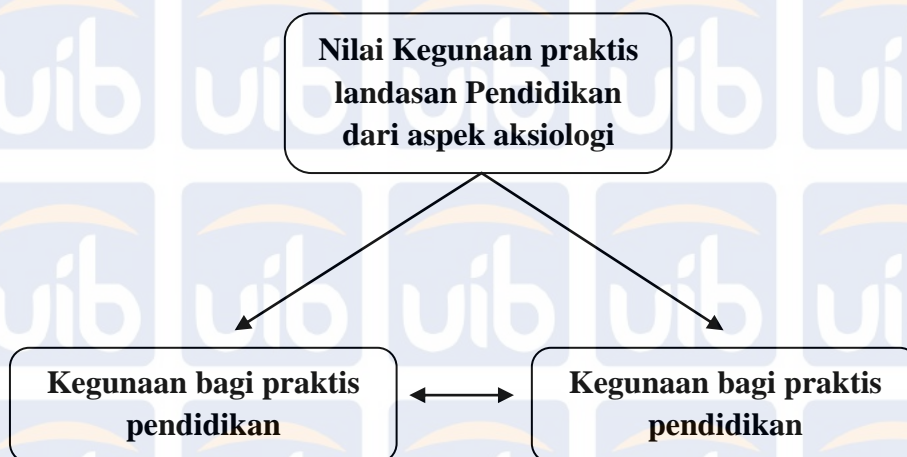
Pengertian landasan pendidikan berdasarkan sudut pandang ontologi dapat dijelaskan berikut ini. Arti pologi menurut *Ensiklopedia Britannica* yang diangkat dari konsepsi Aristoteles, ontologi adalah bagian bidang filsafat yang mencoba mencari hakikat dari sesuatu. Menurut Suriasumantri, ontopologi membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu atau dengan kata lain suatu pengkajian mengenai teori tentang “ada”. Apakah arti ada? Merupakan salah satu ciri pertanyaan ontologi untuk mencari kebenaran tentang objek.<sup>6</sup> Arti landasan pendidikan berdasarkan sudut pandang ontologi adalah pertanyaan tentang “apakah arti landasan pendidikan?” merupakan pertanyaan ontologi. Pertanyaan-pernyataan secara ontologi itu dapat dijawab berdasarkan teori-teori yang telah diuji kebenarannya. Jadi, dari teori-teori yang telah diuji kebenarannya, maka secara ontopologis dapat disimpullkan bahwa: landasan pendidikan adalah bagian-bagian dasar dalam upaya, proses atau kegiatan untuk membentuk

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal 5.

kecakapan intelektual maupun emosional seseorang agar selaras dengan alam dan sesama manusia.<sup>7</sup>

Pengertian landasan pendidikan ditinjau dari aspek epistemologi, adalah teori atau ilmu pengetahuan tentang metode dan dasar-dasar pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan batas-batas pengetahuan dan validitas atau sah berlakunya pengetahuan itu. Bagian-bagian dasar dalam upaya, proses, atau kegiatan untuk mengembangkan ilmu secara produktif dan bertanggung jawab serta memberikan suatu gambaran umum mengenai kebenaran yang diajarkan dalam proses pendidikan. Sedangkan aksiologi dibutuhkan dalam pendidikan, karena pendidikan harus menentukan nilai-nilai mana yang dicapai melalui



Gambar 2.2 Landasan Aksiologis Sistem Pendidikan

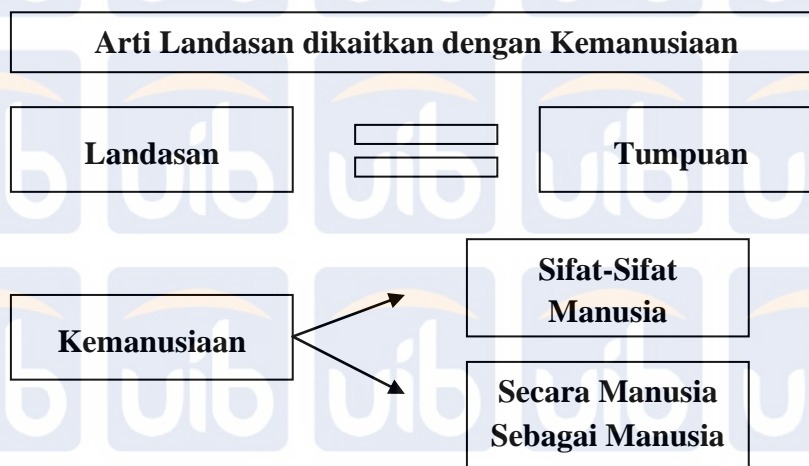
Sumber: Neolaka, 2015: 3.

Proses pendidikan. Disadari atau tidak, pendidikan akan berhubungan dengan nilai, dan pendidikan harus menyadari kepentingan nilai-nilai tersebut.

Bagi para pendidik, landasan pendidikan berfungsi sebagai titik tolak dan acuan

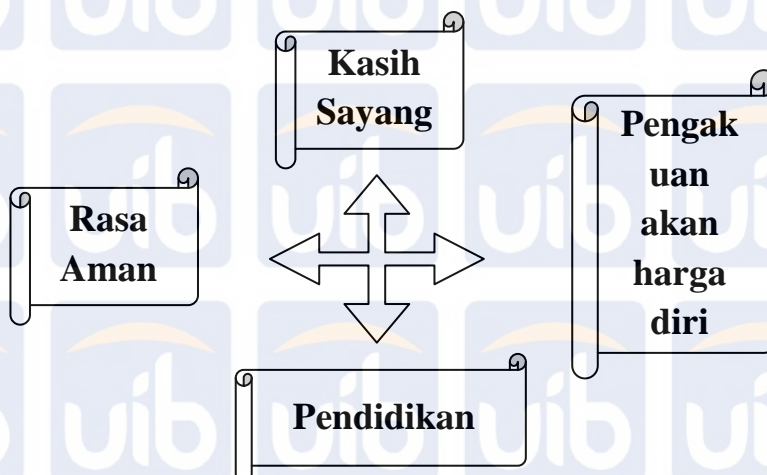
<sup>7</sup> *Ibid.*, hal 6.

dalam rangka melaksanakan tugas profesionalnya, yaitu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pendidikan.



Gambar 2.3 Kaitan Landasan dengan Kemanusiaan

Sumber: kajian literatur.



Gambar 2.4 Landasan Kemanusiaan

Sumber: kajian literatur.

Landasan aksiologis sistem pendidikan nasional penting sebagai dasar untuk menganalisis penerapan teori pendidikan yang berkaitan dengan tujuan pendidikan, terutama dalam kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila yang humanis.

Nilai kegunaan praktis landasan pendidikan dari segi aksiologis adalah



kegunaannya dalam implementasi seni atau teori dan praktik pendidikan (perhatikan pada Gambar 3 dan Gambar 4). Landasan berdasarkan sudut pandang aksiologis dikaitkan dengan ilmu kemanusiaan. Berdasarkan pemahaman dan pemaknaan tentang pendidikan sebagai proses humanis (pemanusiaan), dapat dipandang secara aksiologis sebagai ilmu tentang kaitannya dengan nilai kemanusiaan yang menitik beratkan pada keberhargaan dan kebenaran harkat dan martabat manusia.

Kita perhatikan hubungan antara aksiologis dan pendidikan, maka aksiologis merupakan salah satu cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan: “untuk apa manusia menggunakan ilmunya?”. Aksiologis berasal dari kata Yunani, yaitu: *axios* yang berarti “nilai” dan *logos* berarti “teori” / “ilmu”. Aksiologi dapat dipahami sebagai teori nilai yang mana aksiologi berusaha untuk mempelajari/menyelidiki/mengkaji tentang hakikat nilai-nilai (kebaikan, keindahan, dan kebenaran) terhadap suatu objek (ilmu). Jujur S. Suriasumantri mengartikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh<sup>8</sup>. Pembahasan aksiologi menyangkut masalah nilai kegunaan suatu ilmu adalah ilmu tidak bebas nilai artinya pada tahap-tahap tertentu kadang ilmu harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan moral suatu masyarakat, sehingga nilai kegunaan ilmu tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam suatu usahanya meningkatkan kesejahteraan bersama, bukan sebaliknya malah menimbulkan bencana. Eksistensi ilmu pengetahuan bukan saja untuk mendesak pengetahuan, melainkan kemanusiaanlah yang menggemggam

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal 7.

ilmu pengetahuan untuk kepentingan kemanusiaan, demi terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia.

Bilamana memperhatikan hubungan antara pendidikan dan kemanusiaan, maka pendidikan secara umum bertujuan untuk membantu manusia menemukan hakikat kemanusiaannya. Maksudnya, pendidikan harus mampu mewujudkan manusia seutuhnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik dalam arti yang sesungguhnya adalah proses memanusiakan manusia (*humanisasi*), yakni menghantarkan peserta didik menuju kematangan dan kedewasaan rohani dan jasmani sehingga peserta didik dapat menjadi manusia yang benar-benar sempurna (manusia seutuhnya), baik dari aspek kecerdasan, emosional, spiritual, sikap, dan sebagainya. Ki Hajar Dewantara pernah mengatakan: “ pengaruh pengajaran itu umumnya memerdekakan manusia atas hidup lahiriahnya, sedangkan kemerdekaan hidup batiniahnya itu terdapat dari pendidikan.”<sup>9</sup>

Di dalam mendidik ada pembelajaran yang merupakan komunikasi eksistensi manusiawi yang autentik kepada manusia, untuk dimiliki, dilanjutkan, dan disempurnakan. Disini lah akhir tujuan dari pendidikan, yakni melakukan humanisasi (memanusiakan manusia) yang berujung pada “pembebasan”. Hal ini berangkat dari asumsi bahwa manusia dalam sistem sosial mengalami dehumanisasi karna eksploitasi kelas sosial, diskriminasi gender maupun hegemoni budaya, dan sebagainya. Oleh karna itu, pendidikan merupakan sarana untuk memproduksi kesadaran dalam mengembalikan “kemanusiaan manusia”, dan dalam hal ini, pendidikan berperan untuk membangkitkan kesadaran kritis sebagai

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal 7.



prasyarat upaya untuk pembebasan. Jadi, dapat disimpulkan dari arti landasan dikaitkan dengan kemanusiaan dan ditinjau dari aspek aksiologi adalah: aksiologi berfungsi untuk membatasi/mengawasi suatu ilmu dari potensi hal-hal negatif, seperti: perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia yang mungkin ditimbulkan oleh manusia dalam upaya mendayafungsikan ilmu pengetahuan. Adapun pendidikan bertujuan untuk membantu manusia dalam menemukan hakikat kemanusiaannya. Membebaskan mereka dari eksploitasi kelas sosial, diskriminasi gender, dan sebagainya, sebagai upaya untuk “memanusiakan manusia” (menjadikan manusia menjadi manusia seutuhnya). Jadi, dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa peran penyelenggaraan pendidikan adalah berlandaskan pada asas tujuan kemanusiaan (memanusiakan manusia) dan asas guna/manfaat (aksiologi) untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia.

#### **b. Pengertian Pendidikan Menurut Para Pakar**

Pada buku Landasan Kependidikan Profesor Made Pidarta, memulai halaman dengan dijelaskan bahwa hampir semua orang dikenai pendidikan dan melaksanakan pendidikan. Sebab pendidikan tidak pernah terpisah dengan kehidupan manusia. Anak-anak menerima pendidikan dari orangtuanya bila anak-anak ini sudah menjadi dewasa dan berkeluarga mereka juga akan mendidik anak-anaknya. Begitu pula di sekolah dan perguruan tinggi, para siswa dan mahasiswa



didik oleh guru dan dosen. Pendidikan adalah khas milik dan alat manusia. Tidak ada makhluk lain yang membutuhkan pendidikan.<sup>10</sup>

Pengertian pendidikan secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: pendidikan, teori umum pendidikan, dan ilmu pendidikan.

### 1. Pengertian Umum Pendidikan

Pengertian ini mengarah pada pengertian pendidikan secara umum maksudnya adalah pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat umum.

Pendidikan seperti ini sudah ada sejak adanya manusia di planet bumi:

a. Pendidikan (mendidik) pada zaman purba anak diperlakukan, secara: insting/naluri, pembawa untuk keberlangsungan hidup/keturunan,

tidak perlu di pelajari sebelumnya. Yang termasuk insting sifat/sikap melindungi anak, adalah kasih sayang atau cinta kasih pada anak, kemampuan anak menyusu air susu ibu, merasa di sayang kalau dipeluk ibu, dan lainnya.

b. Pendidikan (mendidik) selanjutnya, bersumber dari pikiran dan pengalaman manusia. Manusia memiliki kemampuan untuk menciptakan cara-cara mendidik, karna perkembangan pikirannya. Cara mendidik juga beragam karena perkembangan otak manusia berbeda.

c. Pendidikan atau pedagogi (kegiatan mendidik) mencakup banyak hal, dan sangat berkaitan dengan perkembangan manusia, mulai dari: perkembangan fisik, pikiran, perasaannya, kemauannya, kesehatan, keterampilan, sosial, dan lainnya, termasuk perkembangan rohani,

<sup>10</sup> Amors Neolaka dan Grace Aminalia A. Neolaka, landasan pendidikan : dasar pengenalan diri sendiri menuju perubahan hidup, cet. 1, Depok: charisma putra utama, 2017 hal., 8.

semuanya ditangani oleh pendidik. Jadi, mendidik maknanya adalah membuat manusia meningkat hidupnya, dari kehidupan alami/ yang lama menjadi baik/berbudaya. Mendidik sama saja dengan kegiatan membudayakan manusia.

Pendidikan adalah kegiatan membudayakan manusia/membuat orang berbudaya. Budaya adalah segala hasil pikiran, kemauan, perasaan, dan karya manusia secara individu/kelompok untuk meningkatkan kehidupan manusia

(budaya bisa dalam bentuk benda-benda nyata dan bisa juga bersifat abstrak).

Komponen kebudayaan, yaitu: gagasan, ideologi, norma, teknologi, dan benda.

Insting: dibawa sejak lahir. Pendidikan dan kebudayaan didapat melalui

belajar. Bagaimana kaitan pendidikan dengan kebudayaan? Pendidikan dan budaya ada bersama dan saling memajukan. Makin banyak orang menerima pendidikan dan budaya ada bersama dan saling memajukan. Makin banyak orang

menerima pendidikan, makin berbudaya orang itu. Makin tinggi kebudayaan, makin tinggi pula pendidikan atau cara mendidiknya. Kebudayaan hanya bisa dibentuk melalui pendidikan. Pendidikan sebagai salah satu aspek kehidupan, ada

dalam kebudayaan. Anak manusia akan menjadi manusia, bila ia menerima pendidikan (bagaimana anak manusia dibesarkan oleh seekor binatang?).

## 2. Teori Umum Pendidikan

Konsep ini berasal dari pandangan Jhon Dewey ahli pendidikan di abad ke-19 yang menyatakan bahwa; *philosophy is the general theory of education* dan di bagian lain dikatakan; *philosophy is the general theory of education*.

Menyamakan filsafat pendidikan dengan teori pendidikan, sehingga ia



menyatakan; pendidikan adalah teori umum pendidikan.<sup>11</sup> Konsep ini bersumber dari filsafat pragmatis yang dianut oleh sebagian besar pendidik di Amerika Serikat. Inti filsafat pragmatis adalah apa yang berguna bagi manusia adalah yang benar. Apa yang berguna tidak bersifat eksak, karena yang bermanfaat sekarang belum tentu bermanfaat untuk tahun yang akan datang. Filsafat pragmatis hampir sama dengan filsafat pendidikan progresif, yaitu mencari terus-menerus sesuatu yang paling berguna bagi hidup dan kehidupan manusia. Temuan yang baru tidak pernah berhenti dalam waktu yang lama, karena akan ada temuan yang baru dan membatalkan temuan yang lama. Berlaku juga untuk tujuan pendidikan, artinya tidak ada tujuan pendidikan yang bersifat final, tujuan pendidikan bersifat sementara. Tujuan pendidikan sekarang belum tentu memuaskan untuk tahun yang akan datang. Alat yang membantu untuk mencapai tujuan, adalah teori pendidikan yang di praktikkan menjadi praktik pendidikan.

Teori pendidikan dalam praktiknya akan berubah-ubah. Prinsip ini yang berlaku di Amerika Serikat. Dapatkah teori yang berubah-ubah itu menjadi suatu teori yang utuh? Sudah pasti tidak. Itulah sebabnya disana mereka tidak menyebutnya sebagai ilmu pendidikan, melainkan sebagai teori umum pendidikan. Teori hanya menjelaskan prinsip-prinsip mendidik secara umum, seperti: didaktik atau metode khusus, yang biasanya di indonesia disebut proses pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar, (KBM) atau proses belajar mengajar (PBM). Dalam mencapai tujuan pembelajaran, KBM tidak pernah lepas dari seni atau kiat mendidik. Konsep-konsep pendidikan tidak selalu pas dilaksanakan di

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal 10.



lapangan. Dalam pendidikan sering kali mencari strategi, siasat, pendekatan baru, taktik, dan biasanya dapat diciptakan sendiri, oleh guru atau pendidik berdasarkan nalar, logika, pengetahuan, dan pengalamannya, dan ini lah yang disebut kiat. Setiap guru atau pendidik pada umumnya mempunyai kiat-kiat sendiri, yang pasti tidak sama antara guru satu dan yang lainnya. Sebab itu sering kali kiat disebut sebagai seni mendidik. Seni mendidik itu bukan milik khusus teori umum pendidikan, namun adalah milik pendidikan secara umum dan milik ilmu pendidikan. Hendaknya dipahami bahwa di dalam praktik pendidikan, selalu ada kiat-kiat atau seni mendidik, walaupun itu dilakukan masyarakat umum dalam mendidik anak-anaknya di rumah, tanpa di sadari telah ada seni mendidik, para pendidik di Amerika Sarikat juga menggunakan seni mendidik, demikian pula para pendidik di sekolah-sekolah di indonesia tercinta ini.

Pengertian pendidikan menurut para pakar atau ahli pendidikan menurut kajian literatur, sebagai berikut ini:

- a. Jhon Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental, emosional ke arah alam, dan sesama manusia;<sup>12</sup>
- b. M.J. Langeveld, pendidikan adalah usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak agar tertuju kepada kedewasaannya, atau lebih tepatnya membantu anak agar cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri;<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hal 11.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal 11.

c. Thompson, pendidik adalah pengaruh lingkungan terhadap individu untuk menghasilkan perubahan-perubahan yang tetap dalam kebiasaan perilaku, pikiran dan sifatnya;<sup>14</sup>

d. Frederick J. McDonald, pendidikan adalah suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mengubah tabiat (*behavior*) manusia;<sup>15</sup>

e. H. Horne, pendidikan adalah proses yang terus menerus dari penyesuaian yang berkembang secara fisik dan mental yang sadar dan bebas kepada Tuhan;<sup>16</sup>

f. J.J. Russeau, pendidikan adalah pembekalan yang tidak ada pada saat anak-anak, tetapi akan dibutuhkan saat dewasa;<sup>17</sup>

g. Ki Hajar Dewantara, menyatakan pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak, agar dapat memajukan kesempurnaan hidup yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya;<sup>18</sup>

h. Ahmad D. Marimba, pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmaniah dan rohani menuju terbentuknya kepribadian yang utama;<sup>19</sup>

i. Insan Kamil, pendidikan adalah usaha sadar yang sistematis dalam mengembangkan seluruh potensi yang ada dalam diri manusia untuk menjadi manusia seutuhnya;<sup>20</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal 11.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal 11.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal 11.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal 11.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal 11.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal 11.

j. Edgar Dalle, pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan, yang berlangsung di sekolah dan luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat mempermainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang;<sup>21</sup>

k. Menurut UU No.2/1989, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan bagi peranannya di masa yang akan datang; dan<sup>22</sup>

l. Menurut UU No.20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pendidikan adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>23</sup>

Pada kajian literatur berupa media cetak dalam internet ditemukan banyak golongan memberi arti tentang pendidikan. Golongan pertama, pendidikan adalah proses belajar mengajar antara pengajar dan yang diajar untuk mendapatkan suatu pengetahuan yang diharapkan dan akan menjadi sebuah bekal di masa depannya.

Golongan kedua, pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar di sekolah antara guru dan muridnya untuk mencerdaskan pada murid yang akan menjadi penerus

<sup>20</sup> *Ibid.*, hal 11.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hal 11.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hal 11.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal 12.



bangsa. Golongan ketiga, pendidikan adalah proses pembelajaran secara langsung maupun tidak langsung antara seseorang maupun golongan yang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan kegiatan pembelajaran, baik disuatu ruangan maupun secara terbuka untuk menambahkan ilmu pengetahuan kepada seseorang yang belum paham akan pendidikan itu.

pengertian di atas, ungkapan dari golongan ketiga adalah ungkapan yang sangat kuat, oleh karna:

a. Pendidikan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

b. Perorangan atau golongan.

c. Didalam ruangan ataupun terbuka.

d. Untuk menambah wawasan kepada yang belum mengetahui akan wawasan itu.

Oleh sebab itu, pengertian pendidikan bukanlah sekedar hanya dalam sekolah saja. Kita bermain juga termasuk belajar, karna tujuannya adalah menambah wawasan. Ketika kita masih kecil atau bayi usia menuju satu tahun, dibantu untuk berjalan oleh orangtua atau orang lain, dan itu juga termasuk pendidikan. Karna tanpa sadar kita telah dilatih untuk menambahkan wawasan dalam mengetahui cara belajar berjalan. Pada contoh ini nyata jelas bahwa pengertian pendidikan adalah latihan melalui latihan kita dapat memahami berbagai pengetahuan (*knowledge*), dengan banyak latihan kita akan terampil melakukan sesuatu pekerjaan apa saja (*hard dan soft skill*), melalui latihan berulang-ulang untuk berhenti merokok, berbicara kotor/tidak senonoh, hidup tidak bertentangan dengan aturan atau perundang-undangan/hukum, pasti bisa,

dan berarti kita memiliki sikap hidup (*attitude*) yang baik, dan pasti bisa hidup di dunia akan diterima oleh masyarakat (akibat adanya pendidikan melalui latihan, setiap orang bisa memiliki hidup yang baik dan benar).

### 3. Ilmu Pendidikan

Membicarakan pendidikan sebagai suatu ilmu. Pandangan ini bermula dari eropa barat, khususnya belanda dengan ahli pendidikannya yang terkenal, *langeveld*. Pendidikan secara resmi di akui sebagai ilmu pendidikan pada 1925, di

belanda. Suatu pengetahuan dapat berubah menjadi suatu ilmu bila memenuhi persyaratan ilmu, yaitu:

1. Memiliki objek.
2. Mempunyai metode penyelidikan.
3. Sistematis.
4. Mempunyai tujuan sendiri.
5. Syarat suatu ilmu harus jelas ontologi, epistemologi, dan aksiologisnya.

Objek pendidikan ada dua, yaitu objek materi dan objek formal. Objek

materi adalah materinya/bendanya yang di kenai pendidikan, yaitu peserta didik dan warga belajar. Objek formal adalah apa yang dibentuk oleh pendidikan, yaitu:

gejala yang tampak, dirasakan, dihayati, dan diekspresikan dalam kehidupan

sehari-hari (prilaku peserta didik/warga belajar). Metode penyelidikan ilmu

pendidikan sama dengan ilmu-ilmu yang lainnya yaitu memakai metode

penelitian ilmiah. Tujuan pendidikan di Indonesia bisa dibaca di UU Sistem

Pendidikan Nasional No. 20/2003.

Pada kajian literatur dikatakan, ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari serta memproses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam upaya mendewasakan manusia melalui pengajaran dalam pelatihan; proses, cara, pembuatan mendidik. Dari pengertian di atas sebenarnya yang terpenting yaitu:

- a. Meningkatkan pengetahuan, pengertian, kesadaran, dan toleransi,
- b. Meningkatkan “*questioning skills*” dan kemampuan menganalisiskan sesuatu, termasuk pendidikannya.
- c. Meningkatkan kedewasaan individu (mengetahui dirinya, hidup jujur, adil, dan rendah hati).

Selanjutnya dari pengertian di atas, tidaklah cukup manakalah bila tujuannya hanya perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok. Kita perlu mengetahui pula bahwa pendidikan dilakukan untuk terjadinya perubahan.

Pernyataannya: (a) mengubah sesuai dengan keinginan siapa; (b) menguntungkan siapa; (c) apakah kita menjadi robot atau manusia kalau “sikap dan tata laku” sama?; (d) untuk perkembangan negara (negara yang mana saja); (e) kita sangat perlu pendidikan yang menghaigai kreativitas dan “*individual thinking*” supaya negara dapat membuat sesuatu yang baru dan lebih baik (tidak hanya meng-copy negara lain, dan tidak akan lebih maju dari negara lain).

Pengertian ilmu pendidikan menurut kajian literatur cetak dan internet, dikatakan bahwa perkembangan pemikiran manusia dalam memberikan batasan tentang makna dan pengertian pendidikan, setiap saat selalu menunjukkan adanya perubahan. Perubahan itu didasarkan atas berbagai temuan dilapangan yang



berkaitan dengan semakin bertambahnya komponen sistem pendidikan yang ada.

Berkembangnya pola pikir para pakar atau ahli pendidikan, pengelola pendidikan, dan pengamat pendidikan yang membuahkan teori-teori baru. Di samping itu, kemajuan teknologi turut andil dalam menwarnai perubahan makna dan pengertian pendidikan tersebut. Pada saat yang sama pula, proses pembelajaran dan pendidikan selalu eksis dan terus berlangsung. Oleh karena itu, bisa jadi pandangan seseorang tentang makna atau pengertian pendidikan yang dianut oleh suatu negara tertentu, pada saat yang berbeda dan ditempat yang berbeda makna dan pengertian pendidikan itu justru tidak akan relevan. Tetapi selama belum ada teori atau temuan baru tentang makna dan pengertian pendidikan, maka teori dan temuan yang telah ada masih relevan untuk digunakan dalam praktik pendidikan.

Selanjutnya, dipahami bahwa ilmu pendidikan adalah dua kata yang dipadukan, yakni ilmu dan pendidikan, yang masing-masing memiliki arti dan makna sendiri. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, tertulis bahwa ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara tersistem menurut metode tertentu, yang dapat dipergunakan untuk menerangkan gejala tertentu dibidang pengetahuan itu. Adapun dalam pengertian filsafah ilmu, ilmu adalah pengetahuan yang di dapatkan berdasarkan metode ilmiah.<sup>24</sup> Pengertian pendidikan adalah proses upaya meningkatkan nilai peradaban individu atau masyarakat dari suatu keadaan tertentu menjadi suatu keadaan yang lebih baik, dan prosesnya melalui penelitian, pembahasan, atau

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal 13.

merenungkan tentang masalah atau gejala-gejala perbuatan mendidik.<sup>25</sup> Di dalam

Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab I pasal 1 dikemukakan, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, akhal mulia serta keterampilan yang di perlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan

negara.<sup>26</sup> Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pendidikan diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.

Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka menjelaskan, bahwa kata pendidikan berasal dari kata didik, yang artinya memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntutan, pimpinan) mengenai akhlak

dan kecerdasan pikiran.<sup>27</sup> Adapun arti pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, dan perbuatan mendidik.

### **c. Sasaran Pendidikan**

Pendidikan pada dasarnya bermaksud membantu peserta didik untuk memberdayakan potensi dalam dirinya atau menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaan. Oleh karna itu, maka sasaran pendidikan adalah manusia. Jadi, pengertian pendidikan sering diartikan sebagai proses memanusiakan

<sup>25</sup> *Ibid.*, hal 13.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal 13.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal 13.



manusia. Profesor Umar Tirtarahardja dan S.L. La Sulo menyatakan bahwa potensi kemanusiaan merupakan benih kemungkinan untuk menjadi manusia.<sup>28</sup> Ibarat biji mangga bagaimanapun wujudnya jika di tanam dengan baik, pasti menjadi pohon mangga dan bukan menjadi pohon jambu. Selanjutnya, dikatakan bahwa tugas mendidik hanya mungkin dapat dilakukan dengan benar dan tepat tujuan, jika pendidik memiliki gambaran yang jelas tentang siapa manusia itu sebenarnya. Manusia memiliki ciri khas yang secara prinsip berbeda dengan hewan. Ciri khas yang membedakan dari hewan terbentuk dari kumpulan terpadu dari apa yang disebut sifat tersebut hanya dimiliki oleh manusia dan tidak dapat dimiliki oleh hewan. Pemahaman pendidik terhadap sifat hakekat manusia akan membantuk peta tentang karakteristik manusia. Peta ini akan menjadi landasan serta memberikan acuan baginya dalam bersikap, menyusun strategi, metode dan teknik, serta memiliki pendekatan dan orientasi dalam merancang dan melaksanakan komunikasi transaksional di dalam interaksi edukatif. Jadi, dengan kata lain menggunakan peta tersebut sebagai acuan seorang pendidik tidak mudah terkecoh ke dalam bentuk-bentuk transaksional yang patologis dan berakibat merugikan subjek didik.

#### **d. Fungsi Pendidikan**

Pembicaraan tentang fungsi pendidikan menjadi sangat penting bagi manusia muda yang baru dilahirkan oleh ibunya. Para pembaca dapat membayangkan jika bayi yang baru lahir dibiarkan oleh orangtuanya, tentu hidupnya tidak akan lama bukan, atau orang tua memelihara anaknya tetapi tidak

<sup>28</sup> Amors Neolaka dan Grace Aminalia A. Neolaka, landasan pendidikan : dasar pengenalan diri sendiri menuju perubahan hidup, cet. 1, Depok: charisma putra utama, 2017 hal., 15



memberikan pendidikan untuk hidup sebagai manusia.<sup>29</sup> Contohnya, jika bayi yang baru lahir dipelihara oleh orangtuanya dengan memberi makanan yang cukup untuk hidup, tetapi orangtuanya tidak pernah menuntut bayi yang bertambah usia untuk melatihnya berjalan, orangtuannya membiarkan anaknya berusaha untuk berjalan sendiri, dapatlah dibayangkan berapa tahun baru anak ini dapat berjalan. Diperparah lagi jika orangtuanya sibuk dengan bekerja dan sebagai contoh, bayi yang berusia 7-8 bulan ini ditinggalkan bersama anjing di rumah setiap hari, pembantunya kurang memperhatikan bayi ini, maka sudah tentu anak ini akan berperilaku seperti anjing. Para pembaca mungkin telah mendengar atau membaca sendiri cerita tentang kedua orang anak yang bernama Amala dan Kamala (masing-masing berusia 2 dan 8 tahun) yang hidup di sarang serigala dan dipelihara oleh serigala, di India pada bulan Oktober 1920. Kehidupan kedua anak ini bertingkah laku seperti serigala, yaitu: berjalan merangkak, tidur di siang hari, malam hari tidak tidur, sering meraung, makanannya daging mentah, menghindari tempat yang terkena sinar matahari, dan tidak dapat memegang dengan jari tangan. Untuk dapat berperilaku seperti manusia yang normal membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun, sebab di dalam cerita ini dikatakan bahwa, Kamala yang 8 tahun pada waktu ditemukan, bertahan hidup sampai 9 tahun berarti usia hidupnya hanya 17 tahun. Pada saat usia tujuh belas tahun di akhir hidupnya Kamala baru dapat berbahasa setaraf dengan anak manusia normal berumur sekitar enam tahun.

---

<sup>29</sup> Amors Neolaka dan Grace Aminalia A. Neolaka, landasan pendidikan : dasar pengenalan diri sendiri menuju perubahan hidup, cet. 1, Depok: charisma putra utama, 2017 hal. 16.

Fungsi pendidikan menjadi sangat penting bagi manusia sejak awal.

Pendidikan dalam arti mendidik adalah memberi bantuan pada anak agar anak yang berusia muda ini bertumbuh normal sebagai manusia lainnya. Mendidik pada lazimnya adalah memberi tuntunan, pertolongan, bantuan kepada peserta didik untuk memberdayakan potensi yang dimilikinya untuk berkembang, dan berkembang terus melalui pendidikan sekolah, dan tetap terus berkembang melalui pendidikan lanjutan sehingga dapat hidup mandiri, dan dapat mengaktualisasikan dirinya dalam kehidupan nyata sebagai manusia normal.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka fungsi pendidikan adalah membantu peserta didik untuk hidup mandiri sebagai manusia normal. Secara spesifik dalam pengertian sempit atau mikro, fungsi pendidikan adalah memberi bantuan secara sadar untuk terjadinya perkembangan jasmaniah dan rohaniah dalam diri peserta didik. Perkembangan jasmaniah adalah mengenal diri jasmaninya, untuk sehat fisik harus disiplin dalam makanan dan minuman, olahraga yang teratur, dan lain sebagainya. Adapun perkembangan rohaniah adalah mulai dengan mengenal dirinya sendiri, diajari untuk mengenal dirinya dengan tuhan. Selanjutnya, fungsi pendidikan secara luas atau makro adalah sangat berkaitan dengan: (1) pengembangan diri pribadi secara makro, yaitu cinta kasih pada teman-teman dan sesamanya, mencintai keluarga, mencintai lingkungan, dan mengenal pencipta alam semesta; (2) pengembangan seni budaya atau kebudayaan bangsa yang aneka ragam; dan (3) pengembangan dirinya sebagai warga negara yang baik, dan sebagai warga negara harus bertekad bulat untuk mempertahankan bangsa dan negaranya. Fungsi pendidikan secara makro ini akan sejalan dengan mulus



manakala di dalam proses pendidikan perlu adanya penekanan pendidikan pada interaksi harmonis, karna sesungguhnya inti dari pendidikan adalah persoalan interaksi, oleh sebab itu interaksi harmonis sangat penting untuk diajarkan dan kemudian diterapkan dalam kehidupan nyata sehari-harinya. Dengan demikian, maka pendidikannya, yaitu masyarakat, keluarga dan guru, harus memberi contoh dan teladan yang baik dalam kehidupan nyata juga, agar para peserta didik meniru atau meneladani orangtuanya, pemimpinnya, yang hidup dalam keharmonisan.

Fungsi pendidikan menurut kajian literatur cetak dan internet, menyatakan bahwa fungsi pendidikan nyata yang dilakukan lembaga pendidikan, sebagai berikut:

- a. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah.
- b. Mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat.
- c. Melestarikan kebudayaan.
- d. Menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipan dalam demokrasi.
- e. Mengurangi pengendalian orangtua, melalui pendidikan di sekolah, orang tua melimpahkan tugas dan wewenangnya dalam mendidik anak kepala sekolah.
- f. Menyediakan sarana untuk pembangkangan, sekolah memiliki potensi untuk menanamkan nilai pembangkangan di masyarakat.

Hal ini tercermin dengan adanya perbedaan pandangan antara



sekolah dan masyarakat tentang sesuatu hal, misalnya pendidikan seks dan sikap terbuka.

- g. Mempertahankan sistem kelas sosial, melalui pendidikan sekolah diharapkan dapat menyosialisasikan kepada para anak didiknya untuk menerima perbedaan prestise, dan status yang ada dalam masyarakat. Sekolah juga diharapkan menjadi saluran mobilitas siswa ke status sosial yang lebih tinggi atau paling tidak sesuai dengan status orangtuanya.
- h. Memperpanjang masa remaja, dengan pendidikan sekolah dapat pula memperlambat masa dewasa seseorang karena siswa masih tergantung secara ekonomi kepada orangtuanya.<sup>30</sup>

#### **e. Komponen-Komponen Pendidikan**

Dalam pelaksanaan pendidikan dibutuhkan komponen-komponen pendidikan agar pendidikan itu berjalan dengan lancar. Peserta didik sebagai manusia muda yang ingin belajar akan mendapatkan pelajaran yang memuaskan manakala terpenuhi komponen-komponen atau faktor-faktor pendidikan yang dipersyaratkan. Perlakuan pembelajaran atau belajar mengajar itu, terlihat ada guru yang mengajar dan peserta didik yang belajar.<sup>31</sup> Belajar adalah proses yang berlangsung dalam diri peserta didik untuk mengubah tingkah lakunya, yaitu: tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Mengejar adalah usaha untuk menciptakan sistem lingkungan belajar yang nyaman yang memungkinkan

<sup>30</sup> *Ibid.*, hal 17.

<sup>31</sup> Syarif Hidayat. Teori dan prinsip pendidikan, Cet. 2, Tangerang: pustaka mandiri, 2015, hal. 13.

termaksud terdiri dari beberapa komponen atau faktor pendidikan. Gulo, W, & Ihsan fuad, Komponen atau faktor pendidikan yang dimaksud, sebagai berikut:<sup>32</sup>

### 1. Tujuan Pengajaran

Tujuan pengajaran merupakan pedoman atau acuan yang diperlakukan untuk memilih strategi pembelajaran (belajar mengajar). Tujuan pengajaran yang berorientasi pada terbentuknya sikap tentu tidak akan tercapai jika strategi pembelajaran berorientasi pada dimensi kognitif. Dalam praktik pendidikan pada umumnya di masyarakat, keluarga, dan sekolah, banyak sekali tujuan pendidikan atau tujuan pengajaran yang diinginkan oleh pendidik atau guru agar tujuan pengajaran dapat dicapai oleh peserta didiknya. Ada berbagai tujuan pengajaran, misalnya tujuan umum, tujuan khusus, tujuan sementara, tujuan perantara, tujuan insidental.

### 2. Guru

Guru merupakan komponen yang sangat penting, karena gurulah yang menciptakan suasana belajar yang nyaman untuk peserta didik beraktivitas yaitu belajar. Guru harus mengenal dirinya terlebih dahulu untuk mengenal peserta didiknya. Artinya, guru harus tahu bahwa dirinya jujur, adil, penyayang, sopan, akan menilai peserta didik dengan adil, memperlakukan peserta didik sebagai manusia, pendek kata guru memiliki karakter yang baik melalui perkataan dan tindakan. Karakter seorang guru menjadi penting karna guru harus menjadi contoh teladan bagi peserta didiknya, guru sebagai model peserta didik, bahkan sesungguhnya guru itu merupakan sebuah tayangan film hidup yang tiap hari

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hal 13.



ditonton dan di perbincangkan oleh para peserta didiknya. Dengan demikian, guru menjadi sangat penting untuk mendidik peserta didik atau anak didik menuju generasi emas yang merupakan bonus demografi.

### 3. Peserta didik

Di dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran para peserta berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, misalnya: lingkungan sosial-budaya, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan orang tua, dan tingkat kecerdasan. Makin tinggi kemajemukan masyarakat, makin tinggi pula perbedaan yang terdapat di dalam kelas. Peserta didik adalah manusia muda yang perlu diperlakukan sebagai manusia oleh gurunya.

### 4. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran dapat merupakan materi formal dan materi informal. Materi formal adalah materi pelajaran atau isi pelajaran yang terdapat dalam buku teks resmi, yaitu berupa buku paket yang disiapkan di sekolah oleh pemerintah. Materi informal adalah bahan-bahan pelajaran yang bersumber dari lingkungan sekolah yang bersangkutan. Bahan-bahan ajaran yang bersifat informal ini dibutuhkan agar proses pembelajaran lebih relevan dan aktual. Faktor ini merupakan salah masukan yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun strategi pembelajaran.

### 5. Metode Pembelajaran

Di dalam kegiatan pembelajaran diperlukan interaksi edukatif, dan agar interaksi dapat berjalan efektif dalam mencapai tujuan, maka dibutuhkan metode pengajaran yang tepat. Metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan



alat untuk mencapai tujuan. Jadi, metode pengajaran perlu karena ketetapan metode akan mempengaruhi bentuk strategi pembelajaran.

#### 6. Media Pengajaran

Media termasuk sarana pendidikan yang tersedia karena sangat berpengaruh dalam pemilihan strategi pembelajaran. Keberhasilan pengajaran tidak tergantung pada canggih/modernnya media yang digunakan, tetapi tergantung pada ketetapan dan keefektifan media yang digunakan oleh gurunya.

#### 7. Faktor Administrasi Finansial

Faktor administrasi dan finansial tidak dapat diabaikan karena menjadi penting dalam berjalan lancarnya suatu aktivitas khususnya aktivitas pembelajaran. Yang termasuk dalam komponen ini adalah jadwal pelajaran, kondisi gedung dan ruangan belajar, dan hal ini menjadi penting dalam memilih strategi pembelajaran. Kegiatan pendidikan atau kegiatan pembelajaran tidak akan berlangsung dengan baik, bila bangunan tempat pelaksanaan pendidikan membahayakan peserta didik, tidak ada ruangan belajar, dan juga kekurangan finansial.

#### f. Hakikat Pendidikan

Sesungguhnya, pendidikan adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi yang dianugerahkan Tuhan kepada manusia dan diarahkan pada tujuan yang diharapkan agar memanusiakan manusia atau menjadikan sebagai insan *kamil*, melalui proses pengajaran, pembelajaran (*ta'lim* dan *tadris*), pembersihan dan pembiasaan (*tahdzib* dan *ta' dib*).<sup>33</sup> Tadrib (latihan) dengan memperhatikan

<sup>33</sup> Syarif Hidayat. Teori dan prinsip pendidikan, Cet. 2, Tangerang: pustaka mandiri, 2015, hal. 17.

kompetensi-kompetensi pedalogi berupa profesi, kepribadian, dan sosial.

Pendidikan menumbuhkan budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran dan tubuh peserta didik yang dilakukan secara intergal tanpa dipisah-pisahkan antara ranah-ranah tersebut.

Berbagai pendapat mengenai hakikat pendidikan dapat digolongkan atas dua kelompok besar pendekatan redaksional dan pendekatan holistik integratif

### 1. Pendekatan Redaksional

Teori-teori/pendekatan redaksional sangat banyak dikemukakan di dalam khazanah ilmu pendidikan. Dalam hal ini akan dibicarakan berbagai pendekatan pedagogos/pedagogisme, pendekatan filosofis / religionisme, pendekatan religius / religionisme, pendekatan psikologis / psikologisme, pendekatan negative / negativisme, pendekatan sosiologis / sosiologisme.

a. Pendekatan Pedagogisme. Titik tolak dari teori ini ialah anak yang

dibesarkan menjadi dewasa. Pandangan ini memiliki bahwa anak telah mempunyai kemampuan-kemampuan yang dilahirkan dan tinggal dikembangkan saja.

b. Pendekatan Filosofis. Anak manusia mempunyai hakikatnya sendiri dan berbeda dengan hakikat orang dewasa. Oleh sebab itu, proses pendewasaan anak bertitik-tolak dari anak sebagai manusia yang mempunyai tingkat. Oleh karna itu, orang dewasa berperan memfasilitasi apa yang sudah dimiliki anak.

c. Pendekatan Religius. Pendekatan ini dianut oleh pemikir-pemikir yang melihat hakekat manusia sebagai makhluk yang religius. Manusia

memiliki naluri tentang ketuhanan dan cinta akan kebenaran yang dalam islam bahwa konsep ketuhanan dan kebenaran sumber utama adalah agama.

d. Pendekatan Psikologis. Pendekatan ini berpandangan bahwa manusia memiliki jiwa yang khas dan satu sama lainnya berbeda.

e. Pendekatan Negativis. Pandangan negativisme melihat bahwa segala sesuatu seakan-akan telah tersedia di dalam diri anak yang bertumbuh dengan baik apabila tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang merugikan pertumbuhan tersebut.

f. Pendekatan Sosiologis. Pandangan sosiologisme cenderung berlawanan arah dengan pedagogisme. Titik-tolak dari pandangan ini ialah prioritas kepada kebutuhan masyarakat dan bukan kepada kebutuhan individu.

## 2. Pendekatan Holistik Intergratif

Pendekatan-pendekatan reduksionisme melihat proses pendidikan proses pendidikan peserta didik dan keseluruhan termasuk lembaga-lembaga pendidikan, menampilkan pandangan ontologis maupun metafisis tertentu mengenai hakikat pendidikan. Teori-teori tersebut satu persatu sifatnya mungkin mendalam secara vertikal namun tidak melebar secara horizontal.

Peserta didik tidak dapat hidup secara terisolasi tetapi dia hidup dan berkembang dalam suatu masyarakat tertentu, yang berbudaya, yang mempunyai visi terhadap kehidupan di masa depan, termasuk kehidupan pasca kehidupan.



Pendekatan holistik integratif merumuskan mengenai hakikat pendidikan sebagai berikut:

a. Pendidikan merupakan suatu proses berkesinambungan.

Pendidikan merupakan suatu proses berkesinambungan yang terus menerus dalam arti adanya interaksi dalam lingkungannya. Lingkungan tersebut berupa lingkungan manusia, lingkungan sosial, lingkungan budayanya dan ekologiannya. Proses pendidikan adalah proses penyelamatan hidup sosial dan penyelamatan lingkungan yang memberikan jaminan hidup yang berkesinambungan. Proses pendidikan yang berkesinambungan berarti bahwa manusia tidak pernah akan selesai, selama ada manusia maka akan terus ada perubahan.

b. Proses pendidikan berarti menumbuh kembangkan eksistensi manusia.

Eksistensi atau keberadaan manusia adalah suatu keberadaan interaktif. Eksistensi manusia selalu berarti dengan hubungan sesama manusia baik yang dekat maupun dalam ruang lingkup yang semakin luas dengan sesama manusia di dalam planet bumi ini, proses pendidikan bukan hanya mempunyai dimensi lokal tetapi juga berdimensi nasional dan global sehingga dengan pendidikan kehidupan manusia tidak akan dapat dibatasi ruang tertentu.

c. Eksistensi manusia yang bermasyarakat.

Proses pendidikan adalah proses mewujudkan eksistensi manusia yang bermasyarakat. Jhon Dewey mengatakan bahwa tujuan pendidikan

tidak berada di luar proses pendidikan itu tetapi di dalam pendidikan sendiri karna sekolah adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, pendidikan ialah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia yang pada dasarnya adalah kehidupan bermoral.

d. Proses pendidikan dalam masyarakat yang berbudaya.

Inti dari kehidupan bermasyarakat adalah nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut perlu dihayati, dilestarikan, dikembangkan dan dilaksanakan oleh seluruh anggota masyarakatnya. Penghayatan dan pelaksanaan nilai-nilai yang hidup, keteraturan dan disiplin para anggota . tanpa keteraturan dan disiplin maka sesuatu kesatuan hidup akan bubar dengan sendirinya dan berarti pula matinya suatu kebudayaan.

e. Proses bermasyarakat dan membudaya mempunyai dimensi-dimensi waktu dan ruang.

Dengan dimensi waktu, proses tersebut mempunyai aspek-aspek historis, kekinian dan visi masa depan. Aspek historis berarti bahwa suatu masyarakat yang telah berkembang di dalam proses waktu, yang menyejarah, berarti bahwa kekuatan-kekuatan historis telah menumpuk dan berasimilasi didalam suatu proses kebudayaan. Proses pendidikan adalah proses pembudayaan. Proses pembudayaan adalah proses pendidikan, jadi keduanya adalah dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan



### 3. Tinjauan Umum Tentang Pengertian Kesejahteraan

#### a. Pengertian kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial di dalam arti yang lebih luas dan mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai kehidupan dan standar

kesejahteraan masyarakat yang lebih baik, kesejahteraan dan atau sejahtera dapat memiliki empat arti (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia di mana orang-

orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai.<sup>34</sup> Dalam ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan keuntungan benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal (lihat ekonomi kesejahteraan), seperti dalam istilah

fungsi kesejahteraan sosial.<sup>35</sup> Dalam kebijakan sosial, kesejahteraan sosial menunjuk ke jangkauan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2009.

“kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”<sup>36</sup>

Menurut Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Kesejahteraan sosial adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang memiliki tujuan untuk membantu individu atau kelompok masyarakat guna memenuh kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan sejalan dengan kepentingan keluarga

<sup>34</sup> <http://digilib.unila.ac.id/11948/16/BAB%20II.pdf> di unduh 16 april 2018

<sup>35</sup> <https://kbbi.web.id/sejahtera> diunduh pada 16 april 2018

<sup>36</sup> Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial

dan masyarakat.<sup>37</sup> Dalam hal ini menunjukkan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Kesejahteraan sosial di negara maju, disebut dengan jaminan sosial (*social security*), seperti bantuan sosial (*social assistance*) dan jaminan sosial (*social insurance*), yang diselenggarakan oleh negara terutama untuk kaum yang kurang beruntung (*disadvantaged groups*). Sedangkan di Indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia.

Dalam konteks yang sangat luas kesejahteraan sosial banyak diinterpretasikan bermacam-macam arti dan makna. Pemaknaan yang luas tentang kesejahteraan sosial tidak dapat disalahkan karena pembahasan kesejahteraan sosial memiliki berbagai ruang lingkup, mulai dari kesejahteraan sosial bermakna kondisi.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1974.

“Kesejahteraan sosial ialah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan batin, yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”<sup>38</sup>

<sup>37</sup> <http://digilib.unila.ac.id/11252/3/BAB%20II.pdf> di unduh 12 april 2018

<sup>38</sup> Undang-undang nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan sosial



## b. Bidang-Bidang Kesejahteraan Sosial

Dalam upaya melihat berbagai bidang Kesejahteraan Sosial, beberapa pakar dalam bidang Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial tidak jarang melihat dari sudut pandang yang berbeda.<sup>39</sup> Meskipun demikian, bila diamati maka akan dapat terlihat ketumpangtindihan dari pandangan pakar yang satu dengan yang lainnya. Dengan adanya perbedaan sudut pandang itu, pada satu sisi dapat membingungkan bagi mereka yang sedang mempelajari ataupun mencoba memahami bidang-bidang kesejahteraan sosial. Akan tetapi pada sisi yang lain, keragaman pandangan ini akan dapat memberikan gambaran tentang keluasan dari bidang kajian yang dibahas dalam Ilmu Kesejahteraan Sosial. Apalagi bila kita mempertimbangkan pula akan adanya beberapa perbedaan pemfokusan dalam melihat permasalahan sosial ada di negara yang sedang berkembang dan negara yang sudah berkembang.

Dengan begitu luasnya bidang kajian Ilmu Kesejahteraan sosial, bidang Kesejahteraan Sosial yang dijelaskan di bawah ini adalah dalam pengertian Kesejahteraan Sosial dalam arti luas serta Kesejahteraan Sosial dalam arti sempit.

Di Indonesia, bidang kesejahteraan sosial dalam arti sempit sering diidentikkan dengan bidang-bidang yang ditangani oleh kementerian sosial. Atau di berbagai negara yang sudah berkembang dikaitkan dengan *Ministry of Health and Welfare* (Kementerian Kesejahteraan dan Kesehatan).

Sedangkan untuk bidang Kesejahteraan Sosial dalam arti luas sering kali diidentikkan dengan bidang yang terkait dengan Kesejahteraan Rakyat yang

---

<sup>39</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial*, cet. 2, (Jakarta rajagrafindo persada, 2015), hal., 90.

meliputi berbagai Kementerian, seperti: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif, Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Kementerian Perumahan Rakyat.

#### 1) Bidang-bidang Kesejahteraan Sosial dalam Arti Sempit

Bidang Kesejahteraan Sosial di beberapa negara yang sudah berkembang, seperti Amerika, Inggris, dan Australia lebih bermakna dalam arti kesejahteraan dalam arti sempit. Karena kesejahteraan

(*welfare*) di berbagai negara yang sudah berkembang lebih bersifat khusus dan merupakan bagian yang sering disandingkan dengan bidang kesehatan dalam kementerian kesejahteraan dan kesehatan (*Ministry of Health and Welfare*).

Bila dilihat dari pembagian bidang-bidang kesejahteraan sosial dalam arti sempit, yang sering kali juga diidentikkan dengan bidang pekerjaan sosial. Secara konvensional ada beberapa bidang yang masuk dalam bidang kesejahteraan sosial dalam arti sempit, digambarkan oleh Zastrow antara lain meliputi:<sup>40</sup>

- a) Bidang yang terkait dengan Sistem Penyampaian Layanan (*Service Delivery System*)

<sup>40</sup> *Ibid.*, hal 91.



Sistem penyampaian layanan menurut Friedlander memainkan peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena dengan pengembangan jaringan sistem penyampaian layanan yang baik maka salah satu unsur penting dalam proses pemberian bantuan terhadap klien dapat terpenuhi, yaitu dalam kaitan dengan:

- (1) Layanan yang dapat diterima dari para petugas ataupun lembaganya (dalam hal ini lembaga dan nonpemerintahan); dan
- (2) Layanan yang ditawarkan oleh lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat, provinsi maupun lokal.

Bentuk layanan yang ditawarkan dari sistem penyampaian layanan kemanusiaan (*human service delivery system*) dapat beragam, seperti bantuan terhadap: yatim-piatu, rumah sakit, lanjut usia, penyandang cacat, lembaga yang memberi bantuan terhadap keluarga dari terpidana penjara, rumah penampungan untuk anak yang melarikan diri dari rumah mereka, rumah penampungan untuk para gelandangan, dan lain sebagainya

#### b) Bidang yang Terkait dengan Layanan Sosial

Keluarga Layanan terhadap keluarga tetap merupakan bidang garapan yang menarik. Salah satunya adalah karena sebagai unit dasar terkecil dari suatu masyarakat, keluarga lah yang pada awalnya membentuk dan mengembangkan kepribadian seseorang. Di beberapa negara yang sudah berkembang ada berbagai bentuk layanan yang

lebih mengkhhususkan diri pada keluarga sebagai *homemaker services*, ataupun layanan untuk para migran dan imigran.

c) Bidang yang Terkait dengan Pelayanan terhadap Anak-anak dan Generasi Muda

Fink melihat layanan terhadap anak mempunyai tanggung jawab, antara lain untuk mendukung kehidupan keluarga, pencegahan dan perlindungan terhadap anak agar mereka tidak diterlantarkan ataupun dianiaya. Layanan semacam ini dilakukan oleh berbagai macam lembaga yang bertujuan untuk menyediakan cara agar anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang sehat.

Dalam kaitan dengan pengembangan area ini, para petugas yang bergerak di bidang ini haruslah mempunyai pengetahuan mengenai perkembangan anak, dinamika keluarga, peran orang tua, dan pengaruh faktor sosial budaya terhadap perkembangan anak. Layanan terhadap anak-anak dan generasi muda itu sendiri mempunyai bentuk yang beragam. Beberapa bentuk layanan yang diberikan pada negara yang sudah berkembang antara lain:

- (1) Layanan kesehatan ibu dan anak;
- (2) Layanan untuk anak penyandang disabilitas;
- (3) Layanan kesejahteraan anak;
- (4) Layanan untuk yatim piatu dan anak terlantar;
- (5) Layanan perlindungan pekerja anak; dan
- (6) Layanan tempat penitipan anak (*day care dan child care*)



d) Bidang yang Terkait dengan Kesejahteraan Sosial untuk Lanjut Usia  
(Lansia)

Sejalan dengan semakin berkembangnya layanan kesehatan, maka angka harapan hidup (*life expectancy*) dalam suatu masyarakat juga meningkat. Karena itu jumlah lansia juga meningkat. Karna itu jumlah lansia juga meningkat. Peningkatan jumlah lansia ini juga memberikan problematika tersendiri, sehingga diperlukan layanan yang khusus guna memenuhi kebutuhan mereka.

Bentuk layanan yang diberikan bagi lansia ini dapat berbentuk layanan guna memenuhi kebutuhan fisik ataupun kebutuhan psikis mereka. Layanan yang diberikan dapat berbentuk layanan dalam panti, seperti: panti lansia atau panti wredha (*nursing home*), ataupun layanan non-panti, seperti *homemakers services*, *meals-on-wheels*; ataupun *organized home care*. Pada beberapa negara yang sudah berkembang, layanan terhadap kelompok lansia ini sudah menjadi bisnis jutaan dolar. Akan tetapi, di beberapa negara yang sedang berkembang bidang ini sering kali belum menempati prioritas utama dalam pengembangannya, terutama bila dibandingkan dengan layanan terhadap anak.

e) Bidang yang Terkait dengan Kelompok Khusus

Mendoza menjelaskan bidang yang terkait dengan kelompok khusus ini sangat beragam di antaranya adalah:<sup>41</sup>

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal 94.

- (1) Pengguna dan penyalahgunaan narkoba;
  - (2) Kelompok perempuan yang secara sosial kurang diuntungkan (*socially disadvantaged women*);
  - (3) Orang dengan HIV/AIDS (ODHA); dan
  - (4) Penyandang disabilitas.
- f) Bidang yang Terkait dengan Jaminan Sosial (Bantuan Sosial dan Asuransi Sosial)

Pada masyarakat industri, pekerjaan sudah menjadi kebutuhan utama masyarakat, di mana dari kegiatan bekerja itu diharapkan mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup lainnya. Sehingga ketika

mereka mengalami PHK (pemutusan hubungan kerja), menderita cacat, atau mengalami gangguan lainnya yang mengancam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, maka mereka sering kali

memerlukan bantuan untuk menunjang ekonomi keluarga tersebut.

Atas dasar pemikiran tersebut maka diperlukan sistem jaminan sosial yang dapat menangani masalah-masalah yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi tersebut.

Sistem yang diharapkan dapat mendukung itu, dalam kerangka negara kesejahteraan dikenal dengan nama jaminan sosial (*social security*), yang pada prinsipnya memfokuskan pada upaya menjamin pendapatan (*income security*) warga negara sehingga ada yang menyebutnya dengan nama jaminan ekonomi (*economic security*).

Jaminan sosial ini mempunyai dua besaran utama, yaitu:

(1) Program bantuan sosial (*public assistance = social assistance*)

yang dibiayai dari pajak, antara lain berbentuk:

- (a) Bantuan perawatan medis (*medicaid*);
- (b) Bantuan untuk lanjut usia (*old age assistance*);
- (c) Bantuan bagi penyandang cacat netra (*aid to the blind*);

(2) Bantuan bagi penyandang cacat tubuh (*aid to the permanently and totally disabled*):

(3) Bantuan bagi keluarga yang mempunyai anak kecil (*aid to families dependent children*);

(4) Bantuan umum (*general assistance*).

(5) Program asuransi sosial (*social insurance*) yang dibiayai oleh pemilik perusahaan, antara lain berbentuk:

- (a) Asuransi untuk lanjut usia (*old age insurance*);
- (b) Asuransi kecacatan (*disability insurance*);
- (c) Asuransi bagi mereka yang tidak bekerja (*unemployment insurance*);
- (d) Kompensasi bagi para pekerja (*workmen's compensation*);
- (e) Asuransi kesehatan (*medicare atau health insurance*); dan
- (f) Asuransi ibu hamil (*maternity insurance*).
- (g) Bidang yang Terkait dengan Pengentasan Kemiskinan

g. Dalam kaitan dengan pengentasan kemiskinan

Friedlander lebih menonjolkan pada peran praktisi dalam mengembangkan kebijakan, program aksi komunitas di masyarakat



dan pengembangan masyarakat guna menanggulangi kemiskinan. Pada kelompok ini, praktisi lebih banyak terkait dalam melakukan perubahan sosial terencana di level komunitas, antara lain melalui pengembangan masyarakat.<sup>42</sup>

Sedangkan Kirst-Ashman melihat program dalam rangka pengentasan kemiskinan pada dasarnya terkait dengan program jaminan sosial yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin kehidupan warganya ketika mereka sedang menghadapi masalah ataupun kesulitan. Sehingga jabaran dari program penanggulangan kemiskinan yang ditawarkan lebih kepada asuransi sosial dan bantuan sosial.<sup>43</sup>

#### h. Bidang yang Terkait dengan Layanan Kesehatan Masyarakat

Pengertian mengenai kesejahteraan masyarakat di dalamnya terkait dengan mengupayakan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka bebas dari suatu penyakit menjadi salah satu indikator tersendiri dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Karena itu dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, isu perawatan medik (*medical care*) dan kesehatan mental tetap mendapat porsi sendiri dalam bahasan ini.

Dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat, para sarjana kesejahteraan sosial dan pekerja sosial ikut serta dalam berbagai program, seperti pengembangan sanitasi umum dan kebersihan diri,

<sup>42</sup> *Ibid.*, hal 97.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal 97.

keluarga berencana, pemantauan dan pengembangan layanan kesehatan di tingkat lokal, dan berbagai kegiatan lainnya.

i. Bidang yang Terkait dengan Perawatan Medik

Dalam bidang perawatan medik para pekerja sosial beserta praktisi yang bergerak di bidang kedokteran (seperti, dokter, perawat, dan fisioterapis) berupaya untuk merawat dan menyembuhkan klien yang mengalami gangguan fisik dan emosional. Pengetahuan mengenai teori dan metodologi yang terkait dengan intervensi mikro (perubahan sosial terencana pada individu, keluarga, dan kelompok) sangat dibutuhkan untuk bidang ini.

j. Bidang yang terkait dengan Layanan Kesehatan Jiwa

Di bidang kesehatan jiwa, sarjana kesejahteraan sosial dan pekerja sosial bekerja sama dengan psikiater, perawat dan psikolog serta beberapa profesi yang terkait mencoba merawat dan mengembangkan program terapi bagi klien yang menderita gangguan jiwa, baik gangguan jiwa ringan maupun berat. Dalam kaitan dengan kerja sama antarprofesi ini, praktisi kesejahteraan sosial di atas lebih memfokuskan perhatiannya pada aspek sosial dari klien, baik itu lingkungan teman sepermainan (*peers*) ataupun keluarga pasien.

Aspek medik lebih banyak ditangani oleh psikiater dan para perawat. Pembagian peran dalam bidang kesehatan jiwa ini sebenarnya erat kaitannya dengan pandangan manusia sebagai makhluk bio-psiko-sosial. Sehingga dalam intervensi terhadap



penderita gangguan jiwa, intervensi dilakukan terhadap elemen biologis, psikis, dan sosial yang terkait dengan kehidupan klien. Di samping kegiatan yang dilakukan di rumah sakit, praktisi kesejahteraan sosial juga ikut serta dalam kegiatan pencegahan gangguan jiwa yang terkait dengan program kesehatan jiwa bagi masyarakat (*community mental health*).

#### k. Bidang yang Terkait dengan Lembaga Koreksional

Di bidang yang terkait dengan lembaga koreksional ini, praktisi kesejahteraan sosial di beberapa negara maju dapat bertugas di lembaga pemasyarakatan anak; peradilan anak; tempat perlindungan untuk anak terlantar, anak yang belum dapat mandiri, serta anak yang teraniaya. Di samping itu, praktisi kesejahteraan sosial dapat pula bergerak di lembaga koreksional yang melakukan program-program preventif di masyarakat, misalnya dalam rangka pencegahan kenakalan remaja.

#### l. Bidang yang Terkait dengan Lembaga Pendidikan

Dalam lembaga pendidikan para sarjana kesejahteraan sosial dan pekerja sosial dapat bergerak sebagai konselor atau pun menjadi pembimbing baik di tingkat pendidikan dasar maupun tingkat pendidikan menengah. Sedangkan di bidang pendidikan tinggi, peran praktisi kesejahteraan sosial dalam rangka bimbingan dan konsultasi terhadap mahasiswa yang bermasalah juga tetap diperlukan. Karena dalam proses belajar mengajar tidak jarang para mahasiswa menemui

situasi yang memberikan tekanan (*stressful situation*), di mana di saat itu diperlukan pihak yang dapat menjadi teman bicara yang dapat meredakan dan menyalurkan stres mereka.

m. Bidang yang Terkait dengan Area Lain

Mendoza menggambarkan dalam bidang ini praktisi yang bergerak di bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial dapat bergerak di sektor industri dalam berbagai perusahaan, antara lain

guna mengatasi keresahan dan ketegangan antarkaryawan ataupun ketika mereka mengalami stres dalam bekerja.<sup>44</sup> Di samping itu, praktisi bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial juga dapat

bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan guna mengembangkan kemampuan karyawan, dan sebagainya.

Zastrow menjabarkan secara singkat bahwa area yang ditangani bidang

kesejahteraan sosial dalam arti sempit antara lain meliputi:

- a. Mencarikan tempat tinggal bagi anak-anak yang tidak mempunyai orang tua.
- b. Merehabilitasi orang-orang yang kecanduan alkohol dan narkoba.
- c. Membantu mereka yang mengalami masalah emosional.
- d. Menjadikan hidup para lansia menjadi lebih bermakna.
- e. Menyediakan rehabilitasi vokasional bagi mereka yang menderita cacat mental ataupun cacat fisik.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal 99.



- f. Membantu orang miskin agar dapat memenuhi kebutuhan keuangan mereka.
- g. Merehabilitasi remaja dan orang dewasa yang melakukan pelanggaran hukum.
- h. Mengakhiri berbagai jenis tekanan dan diskriminasi.
- i. Menyediakan layanan penitipan anak (*child-care*) untuk orang tua yang bekerja di luar rumah.
- j. Melawan kekerasan dalam keluarga, termasuk penganiayaan anak dan juga pasangan hidup (bukan sekadar penganiayaan terhadap perempuan saja, tetapi terhadap pasangan hidup, baik istri maupun suami).
- k. Memenuhi kebutuhan kesehatan dan bantuan hukum mereka yang mengalami kesulitan keuangan. Melakukan konseling terhadap individu dan kelompok yang mengalami berbagai macam kesulitan personal dan sosial (*personal and social difficulties*).
- l. Menyediakan layanan bagi orang menderita HIV/AIDS (ODHA=orang dengan HIV/AIDS) dan keluarga ataupun teman-teman mereka (OHIDHA=orang yang hidup dengan mereka yang menderita HIV/AIDS).
- m. Menyediakan layanan rekreasional dan kegiatan di waktu senggang (*recreational and leisure-time services*) untuk berbagai kelompok kelompok usia.

n. Mendidik dan melakukan sosialisasi terhadap anak yang menderita gangguan kognitif ataupun mereka yang mempunyai kelainan emosional.

o. Memberikan layanan terhadap keluarga yang tertimpa bencana alam, seperti kebakaran hutan dan angin topan.

p. Menyediakan perumahan yang memadai bagi mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal.

q. Menyediakan program yang mendukung dan memperkaya pertumbuhan dan perkembangan seorang anak hingga menjadi dewasa.

r. Menyediakan pelatihan vokasional dan kesempatan kerja bagi mereka yang belum terampil dan belum bekerja.

s. Mencoba memenuhi kebutuhan dari berbagai kelompok minoritas, pekerja migran dan orang-orang kulit berwarna (di Amerika Serikat, kelompok kulit berwarna, kelompok minoritas, dan pekerja migran acapkali mendapat perlakuan yang tidak adil)<sup>45</sup>

## 2. Bidang-Bidang Kesejahteraan Dalam Arti Luas

Bila pada contoh-contoh di atas digambarkan tentang bidang-bidang kesejahteraan sosial dalam arti sempit, maka di bawah ini taksonomi bidang-bidang kesejahteraan sosial dalam arti sempit seperti di uraikan di atas, tetapi lebih jauh lagi yang di buat taksonominya adalah bidang

<sup>45</sup> *Ibid.*, hal 101.

kesejahteraan sosial dalam arti luas. Pengelompokan tersebut sekurang-kurangnya meliputi:

a. Bidang Kesejahteraan Sosial Dilihat Berdasarkan Besaran Kelompok sasaran.

- (1) Bidang yang terkait dengan Kesejahteraan Individu.
- (2) Bidang yang terkait dengan Kesejahteraan Keluarga.
- (3) Bidang yang terkait dengan Kesejahteraan Kelompok.
- (4) Bidang yang terkait dengan Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Lokal (Komunitas Lokal).
- (5) Bidang yang Terkait dengan Pengembangan Kesejahteraan Publik

secara luas.

b. Bidang Kesejahteraan sosial Dilihat Berdasarkan Tingkat Usia Kelompok Sasaran.

- (1) Bidang yang terkait dengan Kesejahteraan Anak dan Remaja.
- (2) Bidang yang terkait dengan Kesejahteraan Generasi Muda.
- (3) Bidang yang terkait dengan Kesejahteraan Lansia (manusia lanjut usia).

c. Bidang Kesejahteraan Sosial Dilihat Berdasarkan Kekhususan Masalah yang Ditangani, antara lain:

- (1) Bidang yang terkait dengan Lembaga Koreksional.
- (2) Bidang yang terkait dengan Lembaga Kesehatan Mental.
- (3) Bidang yang terkait dengan Lembaga Pelayanan Medik



(4) Bidang yang terkait dengan Lembaga Pelayanan yang Menangani

Kecacatan.

(5) Bidang yang terkait dengan Lembaga Pelayanan yang Menangani

Kasus HIV/AIDS.

(6) Bidang yang terkait dengan Lembaga Pelayanan yang Menangani

masalah Prostitusi.

(7) Bidang yang terkait dengan Lembaga Pelayanan yang Menangani

Masalah Perdagangan Anak dan perempuan.

(8) Bidang yang terkait dengan Lembaga Pelayanan yang Menangani

Gelandangan dan Pengemis.

(9) Bidang yang terkait dengan Lembaga Pelayanan yang Menangani

Masalah Migrasi dan Kebencanaan.

(10) Bidang yang terkait dengan Lembaga Pelayanan yang

Menangani Pengetasan Kemiskinan.

d. Bidang kesejahteraan Sosial Dilihat Berdasarkan Sektor-Sektor Pembangunan, antara lain:

(1) Bidang yang terkait dengan pembangunan sektor Pendidikan.

(2) Bidang yang terkait dengan pembangunan sektor Kesehatan

(3) Bidang yang terkait dengan pembangunan sektor Kesejahteraan

dalam arti sempit (di Indonesia terkait dengan kewenangan Kementerian Sosial).

(4) Bidang yang terkait dengan pembangunan sektor Kependudukan

dan Lingkungan Hidup.

(5) Bidang yang terkait dengan pembangunan sektor Perumahan.

(6) Bidang yang terkait dengan pembangunan sektor Ketenagakerjaan.

(7) Bidang yang terkait dengan pembangunan sektor Pertanian.

(8) Bidang yang terkait dengan pembangunan sektor Kehutanan dan Perkebunan.

(9) Bidang yang terkait dengan pembangunan sektor Industri.

(10) Bidang yang terkait dengan pembangunan sektor Hukum dan Hak

Asasi Manusia.

(11) Bidang yang terkait dengan pembangunan Pembangunan sektor Agama.

Bidang-bidang di atas, pada dasarnya dikembangkan guna meningkatkan kondisi kualitas hidup yang ada. Dalam artian, pengembangan berbagai bidang di atas ditujukan untuk meningkatkan

Kesejahteraan masyarakat.

### c. Negara kesejahteraan

Pemaknaan negara kesejahteraan sebenarnya sangat tergantung dengan paradigma besar yang menjadi filosofis dari suatu negara pada suatu periode, contoh Amerika Serikat sebagai suatu negara adidaya dapat memaknai negara kesejahteraan dengan makna yang berbeda, ketika ia berada di bawah rezim partai demokrat atau partai republik. Paradigma sosial-demokrat yang melandasi garis tindak partai demokrat, membuat pemerintah akan memberikan bentuk layanan

kesejahteraan sosial yang berbeda kualitas dan *magnitude* (kekuatan) nya bila dibanding ketika Amerika Serikat berada di bawah Partai Republik.<sup>46</sup>

Miskipun terdapat beragam definisi terkait dengan pengertian Negara Kesejahteraan, ada beberapa pengertian yang sering di gunakan secara umum.

Seperti pengertian yang di kemukakan oleh Deacon, di mana ia menjelaskan Negara Kesejahteraan sebagai:

*“Suatu masyarakat di mana pemerintahnya bertanggung jawab menjamin bahwa setiap warganya menerima pendapatan minimum dan mempunyai akses sebesar mungkin yang ia mampu raih [untuk memenuhi kebutuhan hidupnya] pada bidang perawatan kesehatan, perumahan, pendidikan, dan layanan sosial personal”*<sup>47</sup>

Deacon menambahkan bahwa semua tanggung jawab di atas disampaikan ke masyarakat melalui berbagai macam layanan sosial (*social services*). Berbagai macam layanan sosial ini sendiri sudah dikembangkan sejak pertengahan abad ke-20, tetapi perubahan pada kualitas dan luas cakupan lebih dirasakan setelah terjadinya perang Dunia II. Deacon mengutip pandangan dari Lowe *“for the first time in history all citizens were to be insured from cradle to the grave against every eventuality which might lead to the inadvertent loss of their income”* (untuk pertama kali dalam sejarah setiap warga negara di jamin oleh negara sejak buaian hingga liang kubur dari berbagai kejadian pendapatan mereka yang terjadi secara tidak diinginkan [*inadvertent*]).<sup>48</sup>

Di sinilah salah satu awal semakin berkembangnya konsep dan pemikiran serta diskusi tentang “Negara Kesejahteraan” dalam kaitan dengan ini, sebenarnya

<sup>46</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial*, cet. 2, (Jakarta rajagrafindo persada, 2015.), hal 248.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hal 248.

<sup>48</sup> *Ibid.*, hal 248.



apa yang di kemukakan oleh Deacon pada dasarnya searah dengan apa yang dikemukakan Briggs, tetapi Briggs menggambarkan peluasan makna dari negara kesejahteraan itu sendiri. Briggs menyatakan bahwa negara kesejahteraan adalah:

*“Suatu negara di mana kekuatan yang terorganisasi secara sengaja digunakan baik melalui jalur politik maupun administrasi untuk memodifikasi peran kekuatan pasar setidak-tidaknya melalui tiga arah (objektif): pertama, dengan menjamin pendapatan minimum individu dan keluarga sesuai dengan nilai pasar dalam kaitan dengan pekerjaan yang mereka geluti ataupun pemilikan (property) yang mereka miliki; kedua, mempersempit kesenjangan yang ada dengan memungkinkan individu maupun keluarga agar dapat memenuhi kontingensi sosial tertentu [misalnya, untuk jaminan kesakitan, hari tua, ataupun pengangguran] agar mereka (individu dan keluarga) tidak berada dalam kondisi krisis; dan ketiga, dengan menjamin bahwa setiap warga negara tanpa membedakan status ataupun kelas sosialnya diberikan berbagai jenis layanan sosial yang sudah disepakati dengan standar terbaik yang tersedia pada saat itu”.*<sup>49</sup>

Briggs melihat bahwa kedua tujuan (*objectives*) pertama mengarah pada pandangan negara layanan sosial (*social service state*), yaitu negara dimana sumber daya komunal digunakan untuk menanggulangi kemiskinan dan membantu orang yang sedang berada dalam kesulitan (*distress*) Sedangkan objektif yang ketiga berada melampaui (*beyond*) cakupan dari negara layanan sosial. Karena objektif ketiga lebih memfokuskan dan memasukkan gagasan layanan sosial yang optimum yang dapat diterima masyarakat, dan bukan sekadar gagasan lama tentang pelayanan sosial yang minimum harus diterima masyarakat.<sup>50</sup>

Perhatian dari objektif ketiga di atas bukan sekadar penghilangan perbedaan kelas atau kebutuhan dari kelompok tertentu, tetapi juga lebih jauh lagi

<sup>49</sup> *Ibid.*, hal 249.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal 249.

sudah mengarah pada kesetaraan perlakuan ataupun layanan (*treatment*) dan aspirasi masyarakat (sebagai pemilih) yang mempunyai sumbangan suara yang setara di tingkat pemilihan mereka. Dari sini terlihat bahwa warga masyarakat mempunyai sumbangan terhadap terpilihnya seorang wakil rakyat di daerah pemilihan mereka, di mana suara masing-masing warga adalah sama (setiap warga mewakili satu suara, tanpa dilihat mereka berasal dari kelas ekonomi yang mana). Berdasarkan hal tersebut maka setiap warga berhak mendapatkan pelayanan yang setara tanpa memerhatikan dari kelas ekonomi mana mereka berasal. karna itu, pandangan dari objektif ketiga ini dikatakan berada di luar batasan dari batas layanan minimum (*minimum service requirement*) yang ditawarkan oleh 'negara layanan sosial.

Dalam kaitan dengan pembahasan negara Kesejahteraan Sosial berdasarkan dimensi sejarah dan ketiga objektif di atas, Briggs melihat ada beberapa isu yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Konsepsi tentang kekuatan pasar (*market forces*) meletakkan masalah-masalah negara kesejahteraan dalam konteks ekonomi politik modern (*modern political economy*). Pada negara yang tidak menerapkan pasar bebas masalah kesejahteraan sosial memunculkan isu yang berbeda dengan negara yang mengadopsi sistem pasar bebas.
2. Konsepsi tentang kontingensi sosial ataupun ketergantungan masyarakat (*social contingencies*) sangat dipengaruhi oleh pengalaman industrialisme dan negara tersebut. Masalah kesakitan,



jaminan hari tua pada awalnya sebagai masalah yang harus dihadapi

oleh individu dan keluarga. Dalam perkembangannya, peran negara menjadi bagian penting dalam pengembangan warganya. Terutama ketika drajat kesehatan sudah menjadi bagian dari indikator

kesejahteraan suatu masyarakat. Begitu pula pada masalah pengangguran, di mana saat ini masalah ini sering kali dianggap sebagai salah satu produk dari industrialisasi ataupun masyarakat

Industri. Industrialisasi, menuntut pengusaha agar lebih efisien dan efektif yang kemudian mengarah pada munculnya pengangguran kronis pasca revolusi industri. Berkembangnya isu pengangguran

pada abad ke-19, di sisi yang lain, juga mendorong berkembangnya organisasi buruh dan memunculkan gagasan baru tentang hak-hak pekerja. Di samping itu, kenangan tentang adanya pengangguran

kronis yang terjadi pada masa ini mendorong beberapa negara untuk menggunakan teknik yang berbeda dalam mengembangkan negara kesejahteraan pasca Perang Dunia kedua.

3. Gagasan untuk menggunakan kekuatan yang terorganisasi ( melalui kekuatan politik dan administrasi) untuk menentukan pola pelayanan sosial yang di buruhkan masyarakat mempersyaratkan adanya kajian terhadap pola pelayanan yang pernah di lakukan dengan seksama (*careful historical dating*). Pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa kesejahteraan masyarakat tidak terpusat pada keluarga? Atau pada kelompok keagamaan?, dan sebagainya,



sebenarnya menjadi pertanyaan-pertanyaan yang dulu pernah dilontarkan. Di sini, aspek belajar pada masa yang lalu menjadi aspek yang perlu diperhatikan, terutama dikaitkan dengan kajian negara kesejahteraan dilihat dari dimensi kesejarahan.

Sehingga, pilihan pada negara yang harus mengorganisasi berbagai layanan kesejahteraan untuk masyarakat merupakan hasil kajian yang mempunyai latar belakang sejarah tersendiri. Misalnya saja, pendekatan yang dipilih negara Jerman dan Inggris dalam mengembang kesejahteraan masyarakatnya menunjukkan perbedaan bentuk sistem kesejahteraan yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran berbagai generasi pakar politik dari masing-masing negara. Dari hasil proses sejarah tersebutlah terbentuk sistem kesejahteraan yang mereka kembangkan saat ini.

4. Rentang layanan sosial yang disepakati ("*the range of agreed social services*") menentukan definisi mengenai negara kesejahteraan sosial yang digunakan oleh suatu negara. Kebijakan kesejahteraan sosial, pada dasarnya, bukanlah suatu kebijakan yang tetap sepanjang masa. Selalu ada tempat untuk melakukan perubahan, sejalan dengan adanya perubahan di masyarakat. Sehingga rentang jenis layanan yang disepakati akan berubah pula sesuai dengan sejarah dan kondisi negara tersebut, yang pada akhirnya akan dapat memberikan makna ataupun nuansa yang berbeda dengan apa yang dimaksud dengan

negara kesejahteraan sosial dari suatu negara dengan negara yang lainnya.

5. Ada beberapa pertimbangan sejarah yang harus diperhatikan dalam menelusuri hubungan dari keuga objektif yang dikemukakan Briggs di atas Ketiga objektif atau arah kebijakan kesejahteraan sosial (seperti, apakah layanan yang diberikan lebih diarahkan pada standar minimum kehidupan ataukah standar yang seharusnya didapatkan seseorang) harus dilihat dalam kaitan dengan kondisi di mana kebijakan itu diluncurkan Misalnya saat, negara A memilih kebijakan kesejahteraan sosial yang berlandaskan pada standar umum layanan yang harus diberikan pada masyarakat, sedangkan negara B melihat pada kesejahteraan dilihat dari pendapatan (*income*) masyarakat. Hal ini terjadi, antara lain karena mereka mendefinisikan kesetaraan (*equality*) berdasarkan kriteria yang merekembangkan masing-masing.<sup>51</sup>

Pembahasan di atas, ada tiga kunci utama dalam memahami negara kesejahteraan, yaitu:

1. intervensi yang dilakukan oleh negara (dalam hal ini pihak pemerintah) dalam menjamin kesejahteraan warganya;
2. kesejahteraan harus dikembangkan berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat; dan

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal 252.

3. kesejahteraan adalah hak dari setiap warga negara.

Ketiga konsep di atas (peran dominan dari pemerintah; konsep tentang kebutuhan dan hak warga negara) saling jalin menjalin dan membentuk apa yang dikenal dengan nama Negara Kesejahteraan.

Bila Briggs melihat negara kesejahteraan dari aspek kesejarahan dalam kajiannya, Titmuss lebih memfokuskan kajiannya pada bentuk layanan yang diberikan oleh negara pada warganya, yaitu apakah bentuk

layanan yang diberikan bersifat universal (*universalism social services*) ataukah bentuk layanan sosial yang bersifat selektif (*selectivist social services*). Bila layanan itu bersifat universal, secara sederhana dapat

dikatakan, maka layanan sosial (*social services*) yang dikembangkan harus mencakup seluruh warga negara.<sup>52</sup> Sedangkan bila layanan sosial yang dikembangkan bersifat selektif maka mereka yang akan mendapatkan

layanan sosial itu adalah mereka yang sudah lolos seleksi (*eligible*) untuk menerima layanan sosial tersebut atau dinyatakan layak mendapatkan layanan sosial.

Dalam penerapannya, konsep negara kesejahteraan ini memunculkan beberapa variasi. Esping-Andersen dalam Jamrozik dan Fitzpatrick mengategorikan negara kesejahteraan itu menjadi tiga tipe ideal, yaitu:

1. Rezim Liberal (*liberal regime*) yang sangat individualistik. Rezim ini mendasarkan pandangan pada harapan bahwa setiap individu haruslah mandiri di dalam suatu lingkungan pasar, di mana bantuan dari

<sup>52</sup> *Ibid.*, hal 253.



pemerintah negara bagian (*state assistance*) sangatlah sedikit. Bantuan pemerintah di sini lebih bersifat residual, sehingga menjadi cadangan terakhir (*the last resort*) ketika keluarga dan pasar tidak bisa membantu individu tersebut. Beberapa kriteria yang khas dari rezim ini adalah banyaknya bantuan yang membutuhkan *means-tested* untuk pencairannya (*means-tested additance*), manfaat (*benefit*) pada umumnya ditujukan untuk mereka yang berpenghasilan rendah (*low-income*), serta sedikitnya reformasi sosial (*little social reform*) yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembiayaan yang terkait dengan kesejahteraan sosial dalam arti yang lebih luas seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan/pengangguran, dan perpajakan). Pemikiran rezim liberal ini menurut Fitzpatrick mempunyai akar pada abad ke-19 ketika Undang-undang Kemiskinan (*poor law*) menempatkan proses pemberian *benefit* pada penerima bantuan (*beneficiaries*) sangat selektif berdasarkan *means-testing*, sehingga orang-orang yang benar-benar dan sangat miskinlah yang bisa mendapatkan benefit tersebut, jadi tidak semua orang miskin akan mendapatkan bantuan ini. Dalam sektor perpajakan dan pembiayaan sosial, pada rezim ini relatif sedikit bila dibandingkan pada rezim yang lain. Jamrozik melihat bahwa pada sekitar tahun 2000, beberapa negara yang menjadi contoh dari rezim ini adalah Amerika Serikat (pada saat itu dikuasai partai Republik), Kanada dan Australia (pada saat itu dikuasai oleh partai Nasional).

2. Rezim konservatif atau korporatis (*conservative / or corporatis / regime*) yang memfokuskan tujuan untuk meningkatkan derajat integrasi sosial yang mendekati kolektivisme negara. Rezim ini dikembangkan berdasarkan tradisi konservatif nasionalis (*Bismarkian*), katolik sosial (*social catholicism*) dan demokrasi kristiani (*christian democracy*). Pada rezim ini, bantuan sosial di tingkat nasional (*national state assistance*) lebih banyak diberikan (*generous*) oleh pemerintah bila dibandingkan dengan rezim liberal, akan tetapi prinsip sebagai *last resort* tetap dipertahankan. Karena setiap individu diharapkan baru mencari bantuan ini kalau mereka sudah sangat terdesak, dan tidak mendapatkan bantuan dari keluarga, lembaga amal, lembaga keagamaan (seperti, gereja), lembaga sosial berbasis keagamaan (*church-based social organization*) maupun dari pemerintah lokal. Sebagian dari asuransi sosial memang tersentralisasi dan seragam, akan tetapi pada umumnya sangat terfragmentasi dan rumit (*complex*) karena adanya prinsip bahwa pemerintah akan berusaha menekan pengeluaran untuk hal ini sekecil mungkin (*the lowest possible*). Asuransi komersial diletakkan pada posisi marginal bila dibandingkan dengan lembaga berbasis keagamaan (*church-based*) yang bersifat nirlaba (*not-for-profit*). Karena itu pada rezim ini batasan asuransi sosial dari sektor swasta dan publik menjadi agak tersamar (*blur*). Untuk contoh negara dengan rezim ini pada periode 2000, Jamrozik melihat negara Austria, Prancis Jerman, dan Italia



sebagai salah satu bentuk negara yang menganut rezim korporatis atau negara korporatis (*corporatist states*).

3. Rezim demokratik sosial (*social democratic regime*) yang sangat universal. Karena itu mereka meminimalisasi proses penyeleksian

(*means-testing*), karena menganggap *means-testing* untuk mendapatkan suatu layanan itu kurang penting, karena layanan kesejahteraan sosial yang mereka berikan lebih bersifat universal.

Fokus perlindungan sosial sebagai hak sosial warga negara. (*the social rights of citizenship*) menjadi sentral dalam rezim ini. Perlindungan terhadap keluarga, pensiunan, maupun mereka yang menderita

penyakit juga semakin ditingkatkan. Dalam rezim ini, pengeluaran pemerintah untuk perlindungan sosial (asuransi sosial, bantuan sosial, dan pelayanan sosial) menjadi meningkat, sehingga pajak yang ditarik

dari masyarakat pun juga ditingkatkan. Sebagai contoh negara dengan rezim ini pada tahun 2000 adalah negara Swedia dan negara-negara Skandinavia.<sup>53</sup>

#### d. Negara Kesejahteraan atau Masyarakat Sejahtera

David marsland merupakan salah seorang pakar yang mempertanyakan hal manakah yang sebenarnya menjadi bahasan utama dalam kajian tentang kesejahteraan sosial. Apakah negara kesejahteraan ataukah masyarakat sejahtera yang dituju dalam pembangunan kesejahteraan sosial? Yang mana menjadi tujuan yang mana alat untuk mencapai tujuan? Karena apabila negara kesejahteraan yang

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal 255.



ingin di jadikan tujuan, maka berbagai upaya akan dilakukan untuk mengamankan bentuk negara kesejahteraan yang sudah di tetapkan.<sup>54</sup> Sedangkan apabila masyarakat sejahtera yang menjadi tujuan utama, maka sistem kesejahteraan masyarakatlah yang harus di kembangkan sesuai dengan tuntunan masyarakat, serta dinamika masyarakat dan global.

Pertanyaan-pertanyaan seperti di atas, terpicu antara lain ketika marsland mengkaji bahwa negara kesejahteraan seperti Amerika Serikat, Inggris Raya, dan beberapa negara Eropa lainnya kerusakan yang cukup berat, di mana mereka mengalami kesulitan mengembangkan sistem negara kesejahteraan yang sudah mereka jalani selama ini. Berkembangnya persaingan dalam ekonomi global, yang justru mengakibatkan melemahnya laju pertumbuhan suatu negara, bahkan di negara yang sudah berkembang (*develope countries*) membuat mereka (negara) sedikit demi sedikit mengalami kesulitan untuk meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakatnya, yang salah satunya terlihat dari rencana anggaran yang di kembangkan.

Marsland mengutip pernyataan bell :

*“The (welfare) system itself fraudulent. It talks glibly of insurance and a sosial security fund, but there is none. It is run as a straight transfers system. Money from today's contributors goes straight into the pockets of today's claimants . . . As long as there are enough workers to fund, the obligations can be met. As the population ages the number of burdens will rise faster than the number of shoulders. The morality of social security is than of chain letter. You only benefit if peopel in the future are even bigger mugs than you were”.*

“Sistem kesejahteraan itu sendiri agak menipu. Dalam arti, ia [sistem kesejahteraan] secara mudah berbicara tentang asuransi dan dana

<sup>54</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Kesejahteraan Sosial*, cet. 2, (Jakarta rajagrafindo persada, 2015)., hal 266.

jaminan transfer secara langsung. Uang dari para kontributor yang hidup saat ini akan langsung ditransfer ke kantong-kantong orang-orang yang mengajukan klaim. Selama masih tetap cukup banyak pekerja yang sehat yang dapat memberikan kontribusi dana, berbagai tuntutan [kalim] akan dapat dipenuhi. Akan tetapi, ketika populasi lansia meningkat dibandingkan mereka yang produktif maka beban akan meningkat. Moralitas dari jaminan sosial adalah seperti surat berantai. Kau hanya akan mendapatkan jaminan kalau orang-orang di masa depan yang produktif berjumlah lebih besar dari jumlah kamu saat itu”<sup>55</sup>

Kutipan di atas menggambarkan betapa sistem jaminan sosial yang dikembangkan dewasa ini sangat rapuh dan kadangkala cenderung menyesatkan (*fraudulent*). Karena, bila ternyata jumlah masukan dari mereka yang menjadi kontributor lebih kecil dari mereka yang klaim (*claimants*) maka negara akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan warganya. Di sini, pengaruh melemahnya laju ekonomi, berubahnya piramida usia penduduk (meningkatnya penduduk lanjut usia yang lebih cepat dibandingkan meningkatnya penduduk di usia produktif), serta meningkatnya jumlah penduduk di suatu negara membuat sistem jaminan sosial yang dikembangkan harus dilakukan peninjauan ulang.

Marsland menggambarkan bahwa konsep negara kesejahteraan adalah utopia yang gagal (*failed utopia*). Pandangan ini dimunculkan sebagai salah satu bab dalam bukunya yang membahas tentang negara kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat. Ia melihat bahwa konsep negara kesejahteraan sudah gagal.<sup>56</sup> keterlibatan negara dalam penyediaan layanan pada masyarakat cenderung tidak efektif, karena itu Marsland mengusulkan agar membebaskan kesejahteraan masyarakat dari negara dan mempertimbangkan privatisasi di

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal 267.

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal 268.



bidang kesejahteraan secara lebih serius, seperti apa yang dilakukan di bidang industri. Di sini Marsland, juga menentang pandangan bahwa negara harus menyediakan layanan pada warganya "sejak mereka lahir hingga mereka meninggal dunia" (*state provision of cradle grave*). Kesulitan untuk menyediakan layanan yang paripurna dari lahir hingga liang kubur, bukan saja dihadapi oleh negara industri, akan tetapi juga dihadapi oleh beberapa negara sosialis besar seperti Rusia dan Cina. Hal ini sudah mulai terlihat sejak akhir 1970-an.<sup>57</sup>

Perbaikan derajat kesehatan, membuat angka harapan hidup meningkat, misalnya di Inggris, Marsland menggambarkan angka harapan hidup pada tahun 1901 adalah:

1. 45.5 tahun untuk pria dan 49 tahun untuk perempuan. Sedangkan pada tahun 1991, angka harapan hidup di Inggris menjadi:
2. 73.2 tahun pria dan 78.6 untuk perempuan.<sup>58</sup>

Perubahan angka harapan hidup ini hanya salah satu aspek yang menimbulkan beban yang berbeda pada negara dalam jaminan hari tua. Belum lagi bila dipertimbangkan semakin banyaknya orang yang berusia lanjut dan semakin berkurangnya tingkat fertilitas. sehingga beban dan pemasukan negara untuk menjamin berlangsungnya sistem jaminan sosial yang sudah ditetapkan akan menjadi semakin berat. Padahal di sisi yang lain, konsep kebutuhan dan hak masyarakat (*needs and rights*) menjadi bagian dari tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi oleh negara.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hal 268.

<sup>58</sup> *Ibid.*, hal 269.



Hal di atas adalah contoh sederhana, dari salah satu aspek saja dari jaminan yang harus dipenuhi negara yang makin lama semakin memberatkan negara. Karena itu reformasi terhadap sistem kesejahteraan (*welfare reform*) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembahasan tentang kesejahteraan masyarakat. Marsland mengusulkan agar reformasi kesejahteraan ini dilakukan secara bertahap tetapi terarah. Misalnya saja, proses reformasi kesejahteraan di Inggris Raya sudah diawali sejak tahun 1979-an. Pada periode itu, reformasi yang dilakukan lebih difokuskan pada sektor pendidikan, perumahan dan kesehatan. Di sini keterlibatan pihak swasta mulai diperbesar dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pada tahapan selanjutnya, aspek berikutnya dari kesejahteraan juga dilakukan reformasi, yaitu pada area Jaminan sosial. Sehingga pada era 1980-an empat area yang menjadi fokus reformasi adalah, pendidikan, kesehatan, perumahan dan jaminan sosial.<sup>59</sup>

Terkait dengan indikator yang sering digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan sosial, Spicker menggambarkan usaha kesejahteraan sosial, dalam kaitan dengan kebijakan sosial itu sekurang-kurangnya mencakup lima bidang utama yang disebut dengan "*big five*", yaitu:

1. Bidang Kesehatan
2. Bidang Pendidikan
3. Bidang Perumahan
4. Bidang Jaminan Sosial

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal 269.

## 5. Bidang Pekerjaan Sosial.<sup>60</sup>

Kelima bidang di ataslah yang sering dijadikan standar min-mum untuk mengukur kesejahteraan masyarakat. Meskipun dalam penerapannya di setiap bidang masih terdapat berbagai indikator yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana kondisi kesejahteraan masyarakat di bidang tersebut. Misalnya saja, bidang kesehatan di dalamnya terdapat berbagai indikator seperti: Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi; Tingkat Fertilitas, dan sebagainya. Dalam pengertian yang lebih luas, dan melihat konteks kesejahteraan sosial yang terkait dengan kondisi Indonesia akan tetapi tetap bersifat umum.

### **B. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis yang akan penulis pakai untuk menjawab rumusan masalah pada peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
4. Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil

### **C. Landasan Teoritis**

1. **Teori Implementasi Kebijakan**

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, hal 270.

Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber didalamnya termasuk manusia, dana, kemampuan organisasional, baik oleh pemerintah maupun oleh swasta (individu atau kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan). Sebagai suatu pendekatan untuk pengambilan keputusan, yang memperhitungkan baik keputusan yang fundamental maupun keputusan yang inkremental dan memberikan urutan teratas bagi proses pembuatan kebijakan fundamental yang memberikan arahan dasar dan proses-proses pembuatan kebijaksanaan dan inkremental yang melapangkan jalan bagi keputusan-keputusan itu tercapai.<sup>61</sup>

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek, dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat. Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha

---

<sup>61</sup> <https://eprints.uny.ac.id/18595/4/e.%20Bab%202%2009417144028.pdf> diunduh pada 10 Oktober 2018



untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.<sup>62</sup> Penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Terdapat beberapa teori dari beberapa ahli mengenai implementasi kebijakan, yaitu:

1. Teori George C. Edward

Edward III berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan

mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

- b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan

---

<sup>62</sup> *Ibid*

sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> *Ibid*